

Implementasi Program Moderasi Beragama pada Madrasah di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat

Salwa Salsabila¹, Aldri Frinaldi²

^{1,2}Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang

e-mail: salwasalsabila967@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi program moderasi beragama pada madrasah di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat dan mengetahui faktor yang mempengaruhi program moderasi beragama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program moderasi beragama pada MI, MTs dan MA di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat sudah terimplementasikan dengan baik yang dilihat dari keempat indikator moderasi beragama. Program moderasi Beragama tersebut implementasikan melalui kegiatan-kegiatan madrasah, kebijakan madrasah/tata tertib dan materi pembelajaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi program moderasi beragama pada madrasah dianalisis menggunakan teori Edward III Komunikasi, disposisi dan struktur birokrasi menjadi faktor pendukung, sedangkan sumber daya menjadi faktor penghambat implementasi program moderasi beragama pada madrasah. Selain itu terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program moderasi beragama yaitu lokasi madrasah yang sulit untuk dijangkau dan tidak ada akses internet seperti daerah kepulauan dan 3T dan beberapa daerah perdesaan yang terpencil. Sehingga sosialisasi dan pembinaan belum dilakukan secara menyeluruh kepada seluruh madrasah.

Kata kunci: *Implementasi, Program, Moderasi Beragama, Madrasah*

Abstract

The purpose of this study was to describe and analyze the implementation of the religious moderation program in madrasahs within the Regional Office of the Ministry of Religion of West Sumatra Province and to find out the factors that influence the religious moderation program. The method used in this research is qualitative-descriptive. Data collection techniques using observation techniques, interviews and documentation. The results showed that the implementation of the religious moderation program at MI, MTs and MA within the Regional Office of the Ministry of Religion of West Sumatra Province had been well implemented as seen from the four indicators of religious moderation. The Bergama moderation program is implemented through madrasah activities, madrasah policies/rules and learning materials. The factors that influence the religious moderation program in madrasahs are analyzed using Edward III's theory. Communication, disposition and bureaucratic structure are the supporting factors, while resources are the inhibiting factors in the implementation of the religious moderation program in madrasahs. In addition, there are several problems in the implementation of the religious moderation program, namely the location of madrasahs which are difficult to reach and there is no internet access, such as in archipelagic and 3T areas and some remote rural areas. So that socialization and guidance has not been carried out thoroughly to all madrasahs.

Keywords : *Implementation, Program, Religious Moderation, Madrasah*

PENDAHULUAN

Moderasi beragama berarti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, dan watak sebagai ekspresi sikap keagamaan individu kelompok tertentu. Perilaku keagamaan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan tersebut konsisten dalam mengakui dan memahami individu maupun kelompok lain yang berbeda. Dengan demikian, moderasi memiliki pengertian seimbang dalam memahami ajaran agama, dimana sikap tersebut diekspresikan secara konsisten dalam memegang prinsip ajaran agama dengan mengakui keberadaan pihak lain. Perilaku moderasi beragama menunjukkan sikap toleransi, menghormati atas setiap perbedaan pendapat, menghargai kemajemukan, dan tidak memaksakan kehendak atas nama paham keagamaan dengan cara kekerasan (Kementerian Agama RI, 2019)

Kementerian Agama, telah mengakui pentingnya moderasi beragama untuk mengatasi tantangan keberagaman dan kebangsaan. Tujuan Program Moderasi Beragama yaitu untuk menata kehidupan keagamaan masyarakat Indonesia yang sangat majemuk, dalam rangka menciptakan kehidupan bermasyarakat, beragama, dan berbangsa yang rukun, damai dan toleransi. Provinsi Sumatera Barat menjadi salah satu provinsi yang diberikan anggaran untuk penguatan moderasi beragama dan menjadi tahun toleransi dan kerukunan umat beragama. Kementerian Agama provinsi Sumatera Barat melakukan berbagai sosialisasi dan penguatan moderasi beragama melalui pendidikan, pelatihan dan pembinaan kepada ASN, tokoh agama dan melalui revitalisasi surau kepada masyarakat. Penguatan moderasi beragama melalui pendidikan salah satunya diimplementasikan pada pendidikan madrasah mulai dari tingkat MI, MTs dan MA.

Internalisasi moderasi beragama penting untuk diterapkan di lingkungan madrasah. Hal tersebut bertujuan untuk menanamkan secara kuat agar siswa dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai moderasi beragama di lingkungan sekolah dan masyarakat. Guru memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mewujudkan hal tersebut. Hal ini dikarenakan guru menjadi pihak yang bersentuhan secara langsung dengan siswa (Hafizh Idri Purbajati, 2020). Masih banyak sekolah atau madrasah yang belum memiliki kriteria baku sebagai acuan melihat keberhasilan program moderasi beragama di sekolah-sekolah/madrasah. Hal ini disebabkan, karena belum adanya evaluasi secara menyeluruh dan terstruktur terhadap implementasi program moderasi beragama pada madrasah. Hasil data menunjukkan sekolah/madrasah belum menjalin kerjasama (MOU) dengan instansi lain (Harmi, 2022).

Survei yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Bimbingan Masyarakat Agama dan Layanan Keagamaan pada Badan Penelitian dan Pengembangan pendidikan dan Pelatihan (Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat) Kementerian Agama (Kemenag) merilis Indeks Kerukunan Umat Beragama berdasarkan indikator toleransi, kerjasama dan kesetaraan. Tahun 2019 Hasil nilai rata-rata Nasional diangka 73,83 untuk rentang 1-100. Sedangkan Provinsi Sumatera Barat dibawah rata-rata Nasional dengan indeks Kerukunan Umat Beragama nomor dua paling bawah setelah Aceh, yaitu diangka 64,4. (Harian Haluan, 2019). Pada Tahun 2021 Indeks KUB Sumbar meningkat menjadi 70,5 akan tetapi masih dibawah rata-rata nasional diangka 72,39. Dan pada tahun 2022 indeks KUB Sumbar menurun dan berada dibawah provinsi Aceh diangka 63,47 (Komparatif.id, 2023). Sehingga, dalam mengatasi rendahnya angka Indeks Kerukunan Umat Beragama Sumbar Kementerian Agama Provinsi Sumbar menawarkan tiga program dalam penguatan program moderasi beragama salah satunya melalui pendidikanmadrasah.

Peneliti merasa perlu dilakukan penelitian pelaksanaan program moderasi beragama pada MI, MTs dan MA khususnya di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Agar tujuan dan sasaran kebijakan atau program moderasi beragama dapat tercapai. Peneliti menganalisis program moderasi beragama pada madrasah menilai dari indikator moderasi yaitu Komitmen kebangsaan, toleransi, anti

kekerasan dan akomodatif terhadap budaya lokal dari aspek kebijakan madrasah atau peraturan/tata tertib siswa, kegiatan-kegiatan madrasah dan materi yang diajarkan dalam pembelajaran. Penelitian ini juga menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi program tersebut. pada madrasah dengan menganalisis langsung bagaimana pelaksanaannya pada madrasah. Hal ini bertujuan untuk dapat memberikan solusi atau masukan kepada para implementator kebijakan terkait kendala atau permasalahan yang terjadi dalam proses implementasi program moderasi beragama pada madrasah.

Hasil Penelitian Harmi (2022) menunjukkan bahwa sekolah/madrasah masih belum sepenuhnya siap untuk melaksanakan program moderasi beragama. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya indikator yang belum terpenuhi oleh beberapa sekolah/madrasah untuk mensukseskan program moderasi beragama yang dicanangkan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama. Sedangkan, hasil penelitian Riyanto (2022) menunjukkan bahwa moderasi beragama yang dilaksanakan di lembaga pendidikan sangat efektif dalam memberikan edukasi moderasi beragama bagi setiap peserta didik. Hasil dari penelitian Azis & Prawironegoro, (2022) bahwa Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran Al-Mansyur dalam penerapan kurikulum Pendidikan Agama Islam melalui tiga kegiatan yakni kegiatan intra kurikuler, ekstra kurikuler, serta adabul yaumiyyah baik yang dilakukan setiap hari maupun dilakukan hari-hari tertentu saja. Dari ketiga kegiatan kurikulum tersebut terdapat nilai-nilai moderat beragama yakni keadilan, keseimbangan, kebaikan, hikmah, keistiqomahan, serta toleransi dalam segala kegiatan di masing-masing kegiatan pengembangan kurikulum. Sehingga peneliti menyadari sudah ada beberapa penelitian yang meneliti tentang moderasi beragama pada madrasah, tetapi penelitian ini menilai langsung dari kegiatan-kegiatan madrasah atau kegiatan-kegiatan siswa, peraturan madrasah/ tata tertib siswa dan mata pelajaran yang berkaitan dengan menggunakan indikator moderasi beragama. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program moderasi beragama yang dinilai dari beberapa indikator yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi pada masing-masing implementator program yaitu Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, Kementerian Agama Kabupaten dan beberapa madrasah.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menggali secara lengkap subjek penelitian. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, gagasan atau pendapat, sehingga penelitian ini tidak dapat diukur dengan angka-angka. kemudian digunakan teknik deskriptif untuk memberikan gambaran tentang implementasi Program Moderasi Beragama pada Madrasah berdasarkan pandangan kepalamadrasah, guru dan siswa. Menggali informasi dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, Kementerian Agama Kabupaten Agam dan madrasah ditingkat MI, MTs dan MA dalam melaksanakan program moderasi beragama pada madrasah. Sehingga peneliti dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi dan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program moderasi beragama. Penelitian kualitatif menggunakan teknik analisis mendalam (in-dept analisis), yaitu mengkaji masalah secara khusus (kasus-perkasus) karena penelitian kualitatif yakni bahwa sifat dari suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya. Sehingga yang dihasilkan dalam penelitian ini bukan suatu generalisasi, tetapi pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Teknik dan alat pengumpulan data pada penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini yaitu pemerintah (Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, Kemenag Kabupaten Agam), Kepala Madrasah MIN 8 Agam, MTs S Panyinggahan Maninjau dan Man 4 Agam, guru dan siswa pada masing-masing madrasah.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Barat, Kementerian Agama Kabupaten Agam dan 3 (tiga) Madrasah di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat dari tingkat MI, MTs dan MA. Madrasah tersebut yaitu MIN 8 Agam, MTs S Maninjau dan MAN 4 Agam. Waktu penelitian ini dilakukan pada Tahun 2023. Observasi dilakukan dengan melihat kegiatan-kegiatan madrasah yang berkaitan

dengan program moderasi beragama. Teknik analisis data wawancara dilakukan dengan mereduksi data, menyajikan data dan penarikan kesimpulan. Cara peneliti menguji keabsahan data wawancara yaitu dengan triangulasi sumber, yang pertama dalam menganalisis implementasi program moderasi beragama pada madrasah sumber data yang di triangulasikan yaitu kepala madrasah, guru dan siswa masing-masing madrasah. Kedua, untuk menganalisis Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program peneliti triangulasi sumber digunakan pada beberapa sumber yaitu Kepala Seksi Tenaga Kependidikan Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Agam dan tiga orang Kepala Madrasah. Selain itu, peneliti juga membuktikan beberapa data dengan dokumen pendukung seperti tata tertib/peraturan siswa madrasah, dokumentasi kegiatan terkait moderasi beragama dan poster-poster terkait moderasi beragama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sekolah yang mampu menerapkan moderasi beragama dapat dilihat dari aspek persekolahan yaitu lingkungan sekolah, suasana Kelas, kebijakan sekolah, manajemen sekolah dan hubungan personil sekolah baik hubungan vertical maupun horizontal (Zahroh, 2022). Pemahaman tentang moderasi beragama harus dipahami secara kontekstual bukan secara tekstual, artinya bahwa moderasi dalam beragama di Indonesia buka Indonesia yang dimoderatkan, tetapi cara pemahaman dalam beragama yang harus moderat karena Indonesia memiliki banyaknya kultur, budaya dan adat-istiadat (Mohammad Fahri & Ahmad Zainuri, 2019). Moderat tersebut antara lain: pertama, siswa yang memiliki komitmen kebangsaan dalam bentuk cara pandang dan praktik beragama. Kedua, memiliki sikap toleransi, yakni sikap tenggang rasa dan tidak mengganggu yang menjadi milik orang lain. Ketiga, anti kekerasan, yakni sikap saling menghargai dan cinta kasih terhadap sesama, tidak memiliki pemikiran radikal yang berujung pada sikap terorisme. Keempat, akomodatif terhadap budaya lokal, yakni menerima budaya lokal dan tradisi yang dibuktikan dengan praktik amaliah keagamaan yang baik (Rinda Fauzian et al., 2021). Indikator moderasi beragama dalam hal pemahaman keagamaan memiliki hubungan yang tidak bisa dipisahkan dari arah dan rencana strategis 2015-2019 Kementerian Agama Republik Indonesia yang kemudian di mandatkan dalam RPJMN 2020-2024.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program moderasi beragama dilakukan melalui kegiatan-kegiatan madrasah dan kegiatan siswa, melalui kebijakan madrasah atau peraturan/tata tertib siswa dan melalui materi dalam pembelajaran. Pertama, MI, MTs dan MA mengimplementasi program moderasi beragama pada madrasah berdasarkan indikator komitmen kebangsaan dengan menerapkan nilai-nilai komitmen kebangsaan melalui kegiatan Upacara Bendera dan memperingati hari-hari besar negara. Pada tingkat Aliyah ditambah dengan ekstrakurikuler PBB dan Pramuka. Dan ketiga madrasah sudah mempunyai peraturan/tata tertib yang mendukung penerapan nilai-nilai komitmen kebangsaan tersebut yaitu siswa diwajibkan mengikuti upacara dan kegiatan-kegiatan hari-hari nasional dengan tertib. Selain itu, nilai-nilai komitmen kebangsaan juga ditanamkan kepada siswa madrasah melalui materi dalam beberapa mata pelajaran yaitu mata pelajaran PKN, IPS dan Bahasa Indonesia. Sebagai indikator moderasi beragama yang paling penting, komitmen kebangsaan ingin melihat sejauhmanan praktik beragama seseorang selaras dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan UUD 1945 juga regulasi di bawahnya (Junaedi, 2019).

Kedua, indikator toleransi diimplementasikan pada MI, MTs, MA pada ketiga madrasah yang diteliti, dilakukan dengan cara mengajarkan siswa menghargai teman, menghargai guru dan menghargai masyarakat dengan ikut kegiatan masyarakat seperti gotong royong. Terkait toleransi beragama guru masih sekedar memberikan materi dan pemahaman, belum berbentuk praktek nyata atau tindakan secara nyata. Hal ini disebabkan oleh kondisi lingkungan madrasah yang hanya beragama islam. Akan tetapi siswa sudah ditanamkan nilai-nilai toleransi untuk diamalkan nantinya pada saat bertemu orang yang berbeda agama atau berada dilingkungan yang beragam agamanya. Selanjutnya, dalam tata tertib/peraturan

siswa terdapat sikap yang tidak sesuai dengan nilai-nilai toleransi yaitu mengejek, memperolok-olok dan mengadu domba siswa, guru, kepala madrasah dan karyawan/i. Hal tersebut menjadi pelanggaran apabila dilakukan oleh siswa, pada hakikatnya larangan tersebut tujuannya agar siswa dapat saling menghargai. Selain itu, hasil wawancara dari keempat informan disimpulkan bahwa materi toleransi pada tingkat MIN, MTs dan MA diajarkan melalui mata pelajaran PKN dan Akidah Akhlak.

Toleransi merupakan sikap untuk memberi ruang dan tidak mengganggu orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat, meskipun hal tersebut berbeda dengan yang kita yakini. Sikap terbuka seperti ini menjadi titik penting dari toleransi. Selain keterbukaan dalam menyikapi perbedaan, toleransi mengandung sikap menerima, menghormati orang lain yang berbeda, serta menunjukkan pemahaman yang positif. Pada dasarnya, toleransi tidak hanya terkait dengan intra agama dan toleransi antar agama, namun juga terkait dengan toleransi sosial maupun politik. Dengan demikian, indikator dari moderasi beragama terkait toleransi adalah kemampuan di dalam menunjukkan sikap dan ekspresi keagamaan dengan sesungguhnya untuk menghormati perbedaan yang terjadi di masyarakat. Meskipun ruang lingkup toleransi bersifat umum, namun lebih ditekankan pada toleransi dalam memahami dan menghormati perbedaan yang diilhami oleh faktor pemahaman keagamaan (Kementerian Agama RI, 2019).

Ketiga, indikator anti kekerasan kegiatan madrasah untuk menanamkan nilai-nilai anti kekerasan kepada siswa yaitu dengan cara melakukan kegiatan pembinaan/sosialisasi anti bullying kepada siswa dan memasang poster-poster anti bullying di lingkungan madrasah. Selanjutnya, hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa ketiga madrasah dari tingkat MI, MTs dan MA sudah mempunyai kebijakan/peraturan dalam tata tertib siswa yang berkaitan dengan anti kekerasan. Tata tertib siswa yang berkaitan dengan anti kekerasan pada MI, MTs, MA yaitu siswa dilarang berkelahi atau terlibat perkelahian/tawuran, dilarang membawa senjata tajam/api, dilarang membuat gaduh, membuat ancaman dan dilarang menganiaya/mengintimidasi siswa, guru dan karyawan/i. Hasil wawancara dengan beberapa informan menunjukkan bahwa mata pelajaran MI, MTs, MA yang membahas nilai-nilai anti kekerasan yaitu mata pelajaran PKN, IPS pada semua tingkatan dan pada tingkat MTs dan MA lebih dominan dibahas dalam mata pelajaran bimbingan konseling.

Keempat, indikator Akomodatif terhadap budaya lokal pada MI, MTs dan MA, peneliti menyimpulkan bahwa bentuk kegiatan madrasah terkait akomodatif budaya lokal yaitu melalui ekstrakurikuler silek, tambua tansa dan tari tradisional miangkabau. Selain melalui kegiatan ekstrakurikuler, penguatan nilai-nilai akomodatif terhadap budaya lokal juga diajarkan melalui materi dalam pembelajaran siswa. Akomodatif terhadap budaya lokal diajarkan dalam beberapa mata pelajaran yaitu Seni Budaya dan PKN. Dan dari hasil wawancara dari ketiga informan memperlihatkan bahwa siswa memahami budaya lokal di lingkungan madrasah. Sedangkan kebijakan/peraturan madrasah terkait akomodatif terhadap budaya lokal belum ada pada masing-masing madrasah.

Moderasi beragama perlu mendapat dukungan dari berbagai kalangan. Salah satu pihak yang harus mendukung adalah pemerintah. Pemerintah berperan penting dalam menentukan perkembangan moderasi beragama di lembaga pendidikan. Keputusan atau rekomendasi pemerintah akan jatuh pada guru, sehingga siswa sekolah diajarkan nilai-nilai moderasi oleh guru, dalam hal ini peran guru sangat penting. Perumusan kebijakan mediasi inilah yang secara tidak langsung mengarah pada moderasi dalam sebuah lembaga pendidikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program moderasi beragama pada madrasah. Pertama komunikasi, Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi (Aslinda, 2023). Komunikasi yang terjalin antar implementor kebijakan/program moderasi beragama diantaranya dari pembuat kebijakan yaitu Kementerian Agama RI berupa sosialisasi kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama pada masing-masing daerah atau provinsi dalam skala Nasional,

selanjutnya akan dilanjutkan Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat kepada Kemenag Kabupaten/Kota, dan selanjutnya dilanjutkan kepala kepala madrasah, pengawas madrasah dan tenaga pendidik. Sehingga nantinya kepala madrasah dan tenaga pendidiklah yang akan melakukan penerapan di madrasah. Guru menerapkan melalui mata pelajaran, kepala melakukan pembinaan kepada guru, mengadakan kegiatan-kegiatan terkait moderasi beragama atau melalui kegiatan ekstrakurikuler siswa dan membuat kebijakan/peraturan madrasah yang sesuai dengan indikator moderasi beragama, pengawas akan mengawasi jalannya program moderasi beragama pada madrasah. Sehingga tercapainya penguatan moderasi beragama kepada siswa madrasah. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat khususnya bidang pendidikan madrasah melakukan komunikasi dalam implementasi program moderasi beragama pada madrasah ini dengan Kementerian Agama RI (pusat), bahkan secara langsung menyampaikan informasi/sosialisasi kepada kepala madrasah, pengawas madrasah dan tenaga pendidik. Selain itu, Bimtek, diklat/pelatihan dilakukan juga secara nasional kepada kepala madrasah secara bertahap. Begitu juga dengan Kemenag Kab/Kota juga melakukan komunikasi dengan pelaksana kebijakan yaitu kepala madrasah dan guru melalui pembinaan dan pemantauan. Selain melalui sosialisasi dan pembinaan, komunikasi juga dilakukan melalui evaluasi terkait program moderasi beragama pada madrasah. Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Selain itu juga dalam komunikasi implementasi kebijakan terdapat tujuan dan sasaran kebijakan yang harus disampaikan kepada kelompok sasaran, hal tersebut dilakukan agar mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan (Aslinda, 2023).

Kedua, sumber daya. Sumber daya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud (a). Sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan (b), Sumber daya finansial (Aslinda, 2023). Sumber daya manusia dalam program moderasi beragama ini sudah memadai jika dilihat dari badan pelaksana yaitu pengelola dari Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat, Kemenag Kabupaten Agam. Tetapi dari segi kepala madrasah dan tenaga pendidik masih terdapat SDM yang belum mendapat pembinaan secara keseluruhan, terdapat beberapa madrasah yang diperdesaan seperti kabupaten-kabupaten 3T, daerah kepulauan dan beberapa lokasi lainnya. Dari tiga madrasah yang diteliti dua madrasah sudah mendapat pembinaan terkait program ini, satu madrasah yang lokasinya di daerah perbukitan kepala dan tenaga pendidik belum mendapat pembinaan terkait program ini. Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara Kepala Seksi Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Sumbar, beliau menyatakan terkadang lokasi sulit dijangkau dengan kendaraan dan ada lokasi yang tidak ada sinyal contohnya beberapa daerah di solok, daerah kepulauan dan termasuk beberapa wilayah di Kabupaten Agam. Sumber daya finansial sudah memadai dalam implementasi program moderasi beragama, pembinaan dan evaluasi kegiatan sudah diberi anggaran masing-masing program. Kendala terkait finansial terjadi di FKUB Kemenag Kabupaten Agam, karena FKUB baru ada dua tahun ini jadi anggaran lebih sedikit dibandingkan bidang lain, dan mereka memaksimalkan anggaran kanwil tersebut lebih fokus dalam kegiatan kerukunan umat beragama pada masyarakat.

Ketiga, disposisi dalam implementasi program moderasi beragama sudah sangat baik, dimana yang menjadi pelaksana program benar-benar orang yang sudah ahli atau paham tentang moderasi beragama. Implementator dari Kantor Wilayah Kementerian Agama adalah pegawai yang sudah mengikuti diklat/pembinaan dari pusat atau Kementerian Agama RI. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan (Aslinda, 2023). Begitu juga dengan Implementator dari Kemenag Kabupaten/kota, pelaksana kegiatan adalah SDM yang sudah mendapat arahan dan pembinaan dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya kepala madrasah yang menjadi implementator pada madrasah juga mengikuti diklat/pelatihan baik itu dari Balai Diklat kota padang, Kemenag

Kabupaten, kanwil kemenag sumbar, maupun dalam skala nasional yang diadakan kementerian Agama RI. Bidang Pendidikan madrasah di tingkat provinsi dan kabupaten juga bekerja sama dengan KUB tingkat provinsi dan kabupaten dalam melaksanakan program k moderasi beragama ini.

Keempat, struktur birokrasi implementasi program moderasi beragama pada madrasah. Kanwil melaksanakan sosialisasi/pembinaan kepala madrasah, pengawas madrasah dan guru-guru tentang implementasi penguatan moderasi beragama pada madrasah. Kemenag Kabupaten/kota juga berperan penting dalam sosialisasi dan pembinaan kepada kepala, pengawas dan tenaga pendidik tersebut. Karena merekalah yang melakukan pembinaan penerapan program moderasi beragama di madrasah. Bagaimanapun pelaksana kebijakan yang berasal dari unsur pemerintah (eksekutif) melalui aparat birokrasi itu memiliki sejumlah keterbatasan, baik sumber daya dan dana disamping karena ia juga mempunyai sejumlah tugas dan fungsi lain yang tidak kalah penting dan mendesak disamping kebijakan yang diterbitkan belakangan (Rusli, 2013). Tenaga pendidik melaksanakan penguatan moderasi beragama melalui pendekatan melalui proses pembelajaran didalam mata pelajarannya masing-masing dan juga melalui kegiatan ekstrakurikuler siswa madrasah didalamnya ada kegiatan bakti sosial, kegiatan palang merah remaja, kegiatan pramuka, kegiatan paskibra bela negara. Selanjutnya akan dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat, selain itu Kemenag kabupaten/kota dan pengawas madrasah kabupaten/kota juga berperan mengawasi dan memantau pelaksanaan program moderasi beragama pada madrasah.

Permasalahan dalam implementasi program moderasi beragama berdasarkan hasil penelitian yaitu terdapat madrasah-madrasah yang belum mendapatkan sosialisasi/pembinaan tentang program moderasi beragama. Hal ini disebabkan karena lokasi atau wilayah yang sulit di jangkau, sehingga SDM tenaga pendidik di perkotaan dan di perdesaan berbeda, karena keterbatasan informasi. Sehingga pembinaan terkait program moderasi beragama kepada penaga pendidik masih belum menyeluruh. Kendala lainnya yang terjadi yaitu terkait waktu padatnya kegiatan pembelajaran di madrasah dan padatnya kegiatan implementator menyebabkan program ini terkendala waktu untuk melaksanakan program ini. Selain itu, koordinasi atau kerja sama antara KUB dengan pendidikan madrasah masih belum maksimal karena kegiatan ini lebih banyak dilaksanakan oleh pendidikan madrasah, KUB hanya berpartisipasi dalam beberapa kegiatan. Evaluasi yang dilakukan juga belum terstruktur karena kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan masing-masing bidang/seksi secara terpisah. Belum ada evaluasi dan monitoring khusus terkait program moderasi beragama.

SIMPULAN

Implementasi program moderasi beragama pada madrasah MI, MTs dan MA dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat sudah terimplementasikan dengan baik. Hal ini terbukti keempat indikator moderasi beragama diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan madrasah, kebijakan madrasah/tata tertib dan materi pembelajaran. Dan hal ini berdampak pada sikap dan pemahaman siswa yang mampu mendeskripsikan makna dari keempat indikator moderasi beragama dan bentuk sikap dalam menerapkan nilai-nilai moderasi beragama sesuai empat indikator moderasi beragama dilingkungan madrasah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program moderasi beragama pada madrasah yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Komunikasi, disposisi dan struktur birokrasi menjadi faktor pendukung keberhasilan program moderasi beragama pada madrasah. Sumber daya menjadi faktor penghambat keberhasilan program moderasi beragama pada madrasah. Hal ini disebabkan karena belum seluruh madrasah atau tenaga pendidik mendapatkan sosialisasi dan pembinaan.

Permasalahan dalam implementasi program moderasi beragama pada madrasah yaitu belum semua madrasah yang mendapat pembinaan terkait program moderasi beragama. Selain itu, padatnya jadwal pembelajaran siswa madrasah sehingga kesempatan untuk

melakukan kegiatan program ini sulit. Sehingga dalam melaksanakan kegiatan sehingga kegiatan program moderasi sering diintergrasikan kedalam kegiatan-kegiatan lain. Evaluasi dan pemantauan yang dilakukan belum terstruktur dan menyeluruh, hal ini disebabkan oleh monitoring dan evaluasi yang dilakukan belum dikhususkan untuk satu program moderasi beragama. Peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti objek kajian yang sama untuk meneliti di wilayah 3T atau kepulauan dimana kemungkinan ada permasalahan atau kendala lain yang perlu diteliti dan dicarikan solusinya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih saya ucapkan kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Agam, Min 8 Agam, MTs S Maninjau dan MAN 4 Agam yang mengizinkan saya melakukan penelitian ini dan berkontribusi memberikan data kepada peneliti. Terkhusus kepada dosen pembimbing saya bapak Aldri Frinaldi, SH., M.Hum., Ph.D yang telah membimbing saya dari awal sampai selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama, K. R. (2019). Moderasi Beragama Dalam Pendidikan. In *Jurnal Ilmiah Pedagogy*. <http://proceeding.iainkudus.ac.id/index.php/ICIE%0AAbdul>
- Aslinda. (2023). *Model Kebijakan Publik dan Teori Perubahan Kebijakan*. K-Media.
- Azis, A., & Prawironegoro, D. (2022). Implementasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam (Studi Kasus Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran Al-Mansyur). *ICIE: International Conference on Islamic Education*, 2(2), 25–36. [https://doi.org/http://proceeding.iainkudus.ac.id/index.php/ICIE Abdul](https://doi.org/http://proceeding.iainkudus.ac.id/index.php/ICIE%0AAbdul)
- Hafizh Idri Purbajati. (2020). Peran Guru dalam Membangun Moderasi Beragama di Sekolah. *Falasifa: Jurnal Studi Keislaman*, 11(2), 182–194.
- Harmi, H. (2022). Analisis kesiapan program moderasi beragama di lingkungan sekolah/madrasah. *JPGI (Jurnal Penelitian Guru Indonesia)*, 7(1), 89–95. <https://doi.org/10.29210/021748jpgi0005>
- Junaedi, E. (2019). Inilah Moderasi Beragama Perspektif Kemenag. *Harmoni*, 18(2), 182–186. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v18i2.414>
- Lessy, Z., Widiawati, A., Alif Umar Himawan, D., Alfiyaturrahmah, F., & Salsabila, K. (2022). Implementasi Moderasi Beragama Di Lingkungan Sekolah Dasar. *Paedagogie: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 3(02), 137–148. <https://doi.org/10.52593/pdg.03.2.03>
- Mohammad Fahri, & Ahmad Zainuri. (2019). Moderasi Beragama di Indonesia. *Intizar*, 25(2), 99.
- Rinda Fauzian, Hadiat, Peri Ramdani, & Mohamad Yudiyanto. (2021). Penguatan Moderasi Beragama Berbasis Kearifan Lokal Dalam Upaya Membentuk Sikap Moderat Siswa Madrasah. *AL-WIJDĀN Journal of Islamic Education Studies*, 6(1), 1–14. <https://doi.org/10.58788/alwijdn.v6i1.933>
- Riyanto, R. (2022). Moderasi Beragama pada Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar (Madrasah). *ICIE: International Conference on Islamic Education*, 2, 61–78. <http://proceeding.iainkudus.ac.id/index.php/ICIE>
- Rusli, B. (2013). *Kebijakan publik*.
- Zahroh, A. (2022). Penerapan Moderasi Beragama Melalui Kurikulum Pendidikan. *Bidayatuna Jurnal Pendidikan Guru Mandrasah Ibtidaiyah*, 5(2), 230–243. <https://doi.org/10.54471/bidayatuna.v5i2.1833>